

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pengaruh instrumen fiskal daerah terhadap kualitas lingkungan hidup di Indonesia dalam rentang waktu sebelas tahun, yakni tahun 2014 hingga 2024. Parameter kualitas lingkungan diproksikan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sementara dimensi fiskal dianalisis melalui variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup (BLH), dan Ukuran Daerah (SIZE). Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum menunjukkan hubungan yang konsisten dengan kualitas lingkungan hidup. Secara umum, peningkatan PAD tidak selalu diikuti oleh perbaikan kualitas lingkungan hidup. Bahkan, dalam perkembangan dari tahun ke tahun, peningkatan PAD cenderung berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa bertambahnya pendapatan daerah belum tentu mencerminkan pembangunan yang ramah lingkungan. Dalam beberapa kasus, peningkatan pendapatan daerah masih didorong oleh aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, atau tekanan terhadap sumber daya alam.
2. Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup (BLH) menunjukkan pengaruh yang lebih nyata terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama dalam jangka menengah. Pada model tahun berjalan, BLH belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IKLH. Namun, ketika pengujian mempertimbangkan jeda waktu satu tahun, BLH terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKLH. Temuan ini mengindikasikan bahwa manfaat belanja lingkungan tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan memerlukan waktu sebelum memberikan dampak terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, belanja lingkungan lebih tepat dipandang sebagai investasi publik yang hasilnya muncul secara bertahap seiring dengan implementasi program dan kebijakan lingkungan.
3. Besarnya aset yang dimiliki pemerintah daerah pada umumnya menunjukkan kapasitas pembangunan yang lebih besar. Namun, kepemilikan aset yang besar tidak

selalu diikuti oleh peningkatan kualitas lingkungan hidup. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aset yang dimiliki daerah, tetapi juga oleh bagaimana aset tersebut dikelola, dimanfaatkan, dan diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas lingkungan hidup daerah lebih dipengaruhi oleh bagaimana kapasitas fiskal dikelola, bukan semata-mata oleh besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki. PAD dan aset daerah mencerminkan kapasitas sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah, sedangkan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup merupakan sarana yang secara langsung digunakan untuk mewujudkan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini telah disusun menggunakan pendekatan metodologis yang sistematis serta didukung oleh data sekunder yang kredibel, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasi hasil temuan. Berbagai keterbatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi validitas hasil, melainkan sebagai dasar bagi penyempurnaan dan arah pengembangan penelitian di masa mendatang, yaitu:

1. Penelitian menggunakan data sekunder pada tingkat provinsi sehingga hasil penelitian merepresentasikan kondisi agregat daerah dan belum menangkap variasi antar kabupaten/kota di dalam masing-masing provinsi.
2. Variabel independen yang digunakan masih terbatas pada PAD, BLH, dan SIZE, sehingga belum memasukkan faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi IKLH seperti kepadatan penduduk, struktur industri, urbanisasi, kualitas institusi, dan intensitas energi.
3. Indikator kualitas lingkungan hidup menggunakan IKLH sebagai indeks komposit resmi pemerintah. Meskipun komprehensif, indeks ini tetap memiliki keterbatasan karena merupakan agregasi dari beberapa komponen lingkungan dan belum sepenuhnya menangkap seluruh dimensi ekologis.
4. Penelitian menggunakan model panel statis, sehingga belum secara mendalam menguji hubungan dinamis jangka panjang antarvariabel.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu mengarahkan peningkatan PAD ke aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah dampak lingkungan. Daerah juga perlu meningkatkan kualitas serta kesinambungan Belanja Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup melalui program yang memiliki dampak nyata terhadap kualitas air, udara, tutupan lahan, dan pengelolaan sampah. Selain itu, aset daerah perlu dikelola melalui pendekatan *green asset management* agar mendukung pembangunan berkelanjutan.
2. Pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan *green budgeting* dan memperluas skema *ecological fiscal transfer* atau insentif fiskal berbasis kinerja lingkungan bagi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menjadikan kualitas lingkungan hidup sebagai prioritas pembangunan.
3. APIP, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya perlu memperluas fokus pengawasan dari kepatuhan administratif menuju audit kinerja lingkungan. Pengawasan perlu menilai apakah PAD, aset daerah, dan BLH benar-benar menghasilkan manfaat ekologis dan peningkatan IKLH.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan unit analisis yang lebih rinci, seperti kabupaten/kota, agar mampu menangkap variasi kondisi lingkungan dan karakteristik fiskal daerah secara lebih spesifik. Penelitian mendatang juga dapat menambahkan variabel ekonomi, sosial, maupun kelembagaan yang berpotensi memengaruhi kualitas lingkungan hidup. Selain itu, penggunaan metode analisis yang lebih lanjut, seperti model dinamis *Generalized Method of Moments* (GMM) atau pendekatan spasial, dapat dipertimbangkan untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang serta interaksi antarwilayah. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji masing-masing komponen penyusun IKLH secara terpisah sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Di samping itu, studi komparatif antarnegara dapat dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai pengaruh kapasitas fiskal dan kebijakan lingkungan terhadap kualitas lingkungan hidup dalam konteks yang berbeda.